

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian, didapatkan kesimpulannya yakni:

1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tidak berpengaruh secara langsung terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan nilai investasi domestik belum secara otomatis diikuti oleh peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap. Selain itu, perbedaan penyerapan tenaga kerja antarprovinsi tidak disebabkan oleh perbedaan kekuatan pengaruh PMDN, melainkan lebih mencerminkan perbedaan struktur ekonomi daerah. Sektor-sektor dominan di kedua provinsi cenderung bersifat padat modal, sehingga tambahan investasi lebih banyak diarahkan pada peningkatan efisiensi dan kapasitas produksi dibandingkan penciptaan lapangan kerja baru. Pandemi Covid-19 juga tidak terbukti mengubah pengaruh PMDN terhadap penyerapan tenaga kerja secara signifikan. Dengan demikian, hipotesis H_1 tidak terbukti secara empiris.

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh secara langsung terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode penelitian. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak secara otomatis diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja apabila tidak didukung oleh struktur ekonomi yang mampu menciptakan permintaan tenaga kerja.

Meskipun demikian, pengaruh IPM berbeda secara signifikan antarprovinsi, dengan peran IPM relatif lebih kuat di Provinsi Bali dibandingkan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perbedaan ini mencerminkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia lebih efektif mendorong penyerapan tenaga kerja pada wilayah dengan struktur ekonomi berbasis jasa

dan pariwisata yang lebih responsif terhadap kualitas tenaga kerja, sementara pada wilayah yang masih didominasi sektor primer, peningkatan IPM belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi perluasan kesempatan kerja.

Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 tidak terbukti mengubah pengaruh IPM terhadap penyerapan tenaga kerja secara signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa selama pandemi, dinamika penyerapan tenaga kerja lebih ditentukan oleh kontraksi aktivitas ekonomi dan pembatasan mobilitas dibandingkan oleh variasi kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, hipotesis H₂ tidak terbukti sepenuhnya, khususnya pada bagian yang menyatakan bahwa IPM berpengaruh positif secara agregat dan mengalami pelemahan selama pandemi Covid-19.

3. Jumlah Kunjungan Wisatawan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisata berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode penelitian. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas pariwisata secara agregat mampu mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja, terutama melalui sektor pariwisata dan sektor pendukungnya.

Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pengaruh jumlah kunjungan wisata terhadap penyerapan tenaga kerja antara Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Meskipun Bali memiliki tingkat ketergantungan yang lebih tinggi terhadap sektor pariwisata dibandingkan Nusa Tenggara Barat, secara statistik perbedaan struktur ekonomi tersebut tidak menghasilkan perbedaan kekuatan pengaruh jumlah kunjungan wisata terhadap penyerapan tenaga kerja antarprovinsi.

Namun demikian, pandemi Covid-19 terbukti secara signifikan melemahkan pengaruh jumlah kunjungan wisata terhadap penyerapan tenaga kerja di kedua provinsi. Selama pandemi, pembatasan mobilitas dan penurunan aktivitas pariwisata menyebabkan sektor pariwisata di Bali dan Nusa Tenggara Barat mengalami kontraksi yang berdampak langsung pada pengurangan jam kerja dan kesempatan kerja. Dengan demikian, hipotesis

H₃ terdukung secara parsial, khususnya pada bagian yang menyatakan adanya penurunan pengaruh jumlah kunjungan wisata selama pandemi Covid-19.

4. Pengaruh Simultan PMDN, IPM, dan JKW

Secara simultan, variabel PMDN, IPM, serta JKW berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja berdasarkan hasil uji *Wald Chi-Square*. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh keterpaduan antara investasi domestik, kualitas sumber daya manusia, dan aktivitas sektor pariwisata, serta dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik wilayah dan kondisi pandemi. Dengan demikian, meskipun pengaruh masing-masing variabel secara parsial berbeda, interaksi ketiganya secara bersama-sama membentuk dinamika penyerapan tenaga kerja di kedua provinsi.

5.2 Saran

Dari hasil empiris yang dihasilkan oleh penelitian ini, terlihat jelas bahwa ada berbagai faktor penting yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat. Dalam kerangka tersebut, peneliti menyampaikan beberapa saran di antaranya.

5.2.1 Saran Teoritis

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukkan variabel ekonomi lain yang lebih langsung berkaitan dengan dinamika penyerapan tenaga kerja. Mengingat Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan jumlah kunjungan wisata belum menunjukkan pengaruh signifikan secara parsial dalam beberapa kondisi, penambahan variabel seperti upah minimum, tingkat partisipasi angkatan kerja, struktur sektor industri, Produk Domestik Regional Bruto sektoral, investasi asing (PMA), belanja pemerintah daerah, serta indikator digitalisasi ekonomi diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai determinan penyerapan tenaga kerja di tingkat regional.

2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dengan melibatkan lebih banyak provinsi yang memiliki struktur ekonomi berbeda. Selain itu, penggunaan periode observasi yang lebih panjang, khususnya sebelum dan sesudah pandemi Covid-19, akan membantu mengidentifikasi dinamika jangka panjang pasar tenaga kerja serta membedakan perubahan struktural dari fluktuasi jangka pendek.
3. Mengingat penelitian ini menggunakan model panel statis dengan koreksi *Panel-Corrected Standard Errors (PCSE)*, penelitian berikutnya dapat mempertimbangkan penggunaan model panel dinamis seperti *Generalized Method of Moments (GMM)*, *Spatial Panel Data*, atau pendekatan *non-linear*. Pendekatan tersebut berpotensi menangkap hubungan yang lebih kompleks, terutama terkait perbedaan antarwilayah dan respons variabel ekonomi terhadap guncangan eksternal.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memanfaatkan data dengan frekuensi yang lebih tinggi atau sumber data alternatif guna mengurangi ketergantungan pada teknik interpolasi. Peningkatan kualitas data akan membantu memperkuat akurasi estimasi dan sensitivitas hasil analisis.

5.2.2 Saran Praktis

1. Pemerintah daerah di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat perlu memperkuat kualitas dan arah investasi domestik melalui kebijakan sektoral yang lebih selektif dan berbasis evaluasi kinerja penyerapan tenaga kerja. Peningkatan nilai investasi tidak selalu diikuti oleh peningkatan kesempatan kerja apabila investasi lebih banyak terkonsentrasi pada sektor yang bersifat padat modal. Oleh karena itu, kebijakan investasi daerah perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan nilai investasi, tetapi juga pada kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja. Hal ini dapat dilakukan melalui pemberian insentif bagi sektor-sektor padat karya, penguatan keterkaitan investasi dengan UMKM dan rantai nilai lokal, serta evaluasi berkala terhadap dampak investasi terhadap penyerapan tenaga kerja.
2. Ketergantungan yang tinggi terhadap sektor pariwisata, khususnya di Provinsi Bali, menunjukkan pentingnya diversifikasi struktur ekonomi daerah. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa meskipun aktivitas

pariwisata berperan dalam mendorong penyerapan tenaga kerja, ketergantungan yang berlebihan terhadap satu sektor meningkatkan kerentanan pasar tenaga kerja ketika terjadi guncangan eksternal. Oleh karena itu, pengembangan sektor alternatif seperti agroindustri, perikanan, peternakan, ekonomi digital, dan energi terbarukan menjadi penting untuk memperluas basis ekonomi daerah serta memperkuat ketahanan pasar tenaga kerja dalam jangka panjang.

3. Meskipun Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh secara agregat terhadap penyerapan tenaga kerja, perbedaan pengaruh antarprovinsi menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia akan lebih efektif apabila selaras dengan struktur ekonomi daerah. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan diikuti oleh ketersediaan lapangan kerja yang sesuai. Penguatan pendidikan vokasi, pelatihan berbasis kebutuhan industri, serta sertifikasi kompetensi yang relevan dengan sektor unggulan daerah menjadi langkah penting agar peningkatan kualitas tenaga kerja dapat dioptimalkan dalam menciptakan kesempatan kerja.
4. Pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja, khususnya yang bergantung pada sektor pariwisata, rentan terhadap guncangan eksternal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat strategi mitigasi risiko ketenagakerjaan guna meningkatkan ketahanan pasar tenaga kerja. Upaya yang dapat dilakukan meliputi penguatan digitalisasi UMKM, perluasan perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal, serta pengembangan model pariwisata yang lebih adaptif terhadap kondisi krisis. Strategi tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas kesempatan kerja dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi di masa mendatang.